

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan nasional dari Pelita I sampai Pelita VII telah menghasilkan perubahan struktur ekonomi nasional dari basis sektor agraris ke basis sektor industri. Di daerah perkotaan sektor industri telah menyebabkan meningkatnya arus urbanisasi sebagai perwujudan diversifikasi pembangunan untuk meningkatkan kesempatan kerja di sektor pertanian, memberikan keseimbangan hubungan desa kota serta mengantisipasi industrialisasi yang sedang berjalan sehingga terjadi penyebaran pembangunan.

Namun proses industrialisasi ini mengalami guncangan hebat pada akhir tahun 1997 diawali dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan, mengakibatkan krisis multi dimensi dengan laju pertumbuhan (inflasi) berada dibawah nol (minus 4%) dan dampaknya banyak tenaga kerja di sektor industri, pengusaha kecil dan kecil bawah (grass root) mengalami pemutusan hubungan kerja atau kehilangan lapangan usaha yang selama ini menjadi tumpuan kelangsungan hidup.

Hal ini, seperti dikemukakan oleh Departemen Tenaga Kerja bahwa

“Dampak krisis ekonomi ini telah meningkatkan jumlah penganggur tenaga kerja trampil maupun tenaga kerja non trampil, yang pada akhir tahun 1997 diperkirakan mencapai 31,8% ditambah dengan laju pertumbuhan minus 4, maka angka pengangguran terbuka menjadi 13,4 juta yang meliputi tambahan pengangguran 4 juta, perkiraan PHK 3,6 juta dan sisa penangguran tahun sebelumnya (1996 – 1997) sebesar 5,8%” (Depnaker, 1998; 13).

Bahkan menurut Badan Pusat Statistik , seluruh sektor perekonomian sebagai dampak krisis tersebut dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi mencapai minus 13,68% artinya terjadi penurunan produksi sebesar 13,68 persen dibandingkan tahun 1997.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi total pada tahun 1998 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1-1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akhir Tahun 1998

No	Sektor	1997	1998
1.	Pertanian	0,72	0,22
2.	Pertambangan dan penggalian	1,71	- 4,16
3.	Industri	6,42	- 12,88
4.	Listrik , gas dan air bersih	12,75	3,70
5.	Bangunan	6,43	- 39,74
6.	Perdagangan , hotel dan restoran	5,80	- 18,95
7.	Pengangkutan dan komunikasi	8,31	- 12,80
8.	Keuangan , persewaan dan jasa perusahaan	6,45	- 26,74
9.	Jasa – jasa	2,84	- 4,71

(Sumber : Manajemen Usahawan Indonesia , 1999 ; 25)

Hanya listrik , gas dan air bersih yang mengalami penurunan diatas pertumbuhan 1% karena sektor tersebut tidak terpengaruh oleh bahan baku yang harus diimpor . Sedangkan sektor lainnya nyaris tidak produktif bahkan menurun , sehingga mengakibatkan jumlah karyawan yang ter-PHK maupun masyarakat yang kehilangan usaha semakin berlipat jumlahnya .

Disisi lain adanya krisis multi dimensi ini membawa hikmah tersendiri bagi upaya pemberdayaan dan pengembangan ekonomi rakyat yang membawa makna menempatkan rakyat beserta institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi yang dirintis oleh pemerintah , perusahaan maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan pola kemitraan.

misalnya : penyisihan satu sampai lima persen laba BUMN untuk membantu pengusaha ekonomi lemah dan koperasi (pondok pesantren) di Jawa Timur yang diserahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil pada tanggal 31 Juli 1995 dengan pola bapak asuh (Majalah Mitra , No 3 tahun 1 , 1995) , P2KER (Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat) , Kerjasama antara Departemen Tenaga Kerja , Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) melalui Program Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil (P3T) dan Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK) , kerjasama antara Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dengan Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOMPONTREN) dsb.

Hal tersebut diatas menunjukkan adanya suatu paradigma ekonomi rakyat yang menurut Ahmad Mahmudi (1998 , makalah) bukan saja berupa tuntutan atas pembagian secara adil aset ekonomi tetapi juga merupakan keniscayaan ideologis dengan semangat meruntuhkan dominasi – dominasi birokrasi dalam mengatur dan menentukan berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Pengertian ekonomi kerakyatan menurut Sarbini (Theresia Trisanti ; 1999 ; 25) adalah “ suatu sistem partisipatif yang memberikan akses keadilan bagi seluruh

lapisan masyarakat dalam proses produksi , distribusi dan konsumsi nasional tanpa harus mengorbankan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan “.

Perkembangan ekonomi kerakyatan menurut Ahmad Mahmudi ditandai dengan :

1. Hilangnya sistem ekonomi konglomerasi , sistem ini bukan hanya eksploitatif terhadap ekonomi kecil tetapi juga kerap kali tidak efisien
2. Hilangnya kesenjangan antar daerah
3. Berkurangnya tingkat pengangguran karena terbukanya peluang bagi terserap- nya tenaga kerja terutama didaerah pedesaan
4. Berkembangnya peran dan fungsi institusi ekonomi rakyat yang dilakukan melalui pembuatan jaringan perbaikan teknologi dan penguatan pasar.
5. Berkembangnya aspek manajerial dalam pengembangan sumber daya baik manusia maupun non manusia
6. Berkembangnya akses rakyat pada sumber modal.

Dengan demikian ekonomi kerakyatan menunjuk pada pemberdayaan berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan pelakunya adalah dari rakyat , oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat, hal ini bertolak belakang dengan pola ekonomi konglomerasi yang hanya menguntungkan satu dimensi yaitu para pemilik modal yang kuat.

Beberapa hal yang menjadi alasan pentingnya pengembangan ekonomi kerakyatan adalah :

1. Mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak (padat karya)
2. Bahan baku banyak berasal dari sumber daya alam lokal dan tidak tergantung pada bahan baku impor
3. Mengandalkan teknologi tepat guna

4. Memiliki daya tahan terhadap guncangan , misalnya krisis sehingga dapat menjadi katup pengaman saat pertumbuhan ekonomi mengalami kemunduran atau stagnasi.

Dalam pengembangan sektor ekonomi yang berbasis kerakyatan ini , pemerintah telah mengadakan reformasi yang mendasar , dengan dikeluarkannya TAP MPR No.XVI/1998 pasal 5, yang menyatakan :

“ Usaha kecil , menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama , dukungan , perlindungan pengembangan seluas – luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat , tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik negara (BUMN)”.

Salah satu program strategis yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (BINAPENTA) Departemen Tenaga Kerja adalah melaksanakan kerjasama dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan Lembaga swadaya Masyarakat PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) , dalam rangka mengurangi pengangguran akibat krisis ekonomi di Indonesia melalui Program Pelatihan P3T (Penanggulangan Pengangguran Pekerja terampil) tahun anggaran 1998 / 1999

Tujuan program tersebut adalah untuk memberikan motivasi sekaligus menciptakan lapangan kerja / lapangan usaha yang produktif bagi pengangguran pekerja terampil serta memberdayakan lembaga ekonomi rakyat yang mengakar dimasyarakat.

Kegiatan tersebut dikembangkan di 18 propinsi dengan target mampu mengangkat pengangguran pekerja terampil sebanyak 65.000 orang (Ringkasan Proyek P3T Depnaker , tahun 1998/1999) , sedangkan untuk propinsi Jawa Tengah mendapat alolasi paket sebanyak 282 dengan total dana sebesar Rp 32.549.718.000,00

(Tiga puluh dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah). (Dirjen BINAPENTA Depnaker , 1998 ; 3)

Adapun pelaksanaan programnya adalah dengan memberikan pelatihan kepada para pengangguran pekerja terampil yang dibagi dalam 3 tahap yaitu :

1. Tahap pelatihan dasar dikelas untuk diberikan pengetahuan , keterampilan dan sikap dibidang Lembaga ekonomi produktif (LEP BMT) , warung grosir (WARGO) , Pusat Informasi dan Konsultasi Usaha Kecil (PIKUK) maupun Pembina Usaha Kecil (PUK)
2. Tahap pemagangan yang dilaksanakan pada lembaga keuangan syari'ah, grosir maupun PINBUK Dati II, untuk mempraktekkan apa yang telah diperolehnya selama pelatihan sehingga dapat lebih cepat memahami dan menguasai materi .
3. Tahap pemantapan dan evaluasi atas keseluruhan proses pelatihan dan pemagangan serta penyusunan agenda tindak lanjut bagi peserta pelatihan setelah selesai pelatihan .

Tujuan akhir dari program pelatihan P3T adalah terserapnya para pengangguran pekerja terampil :

1. Dalam kegiatan usaha produktif dan berkelanjutan bagi penganggur tidak terampil diberbagai sektor lapangan usaha (pertanian , perdagangan dll)
2. Sebagai wirausaha - wirausaha baru baik secara perorangan maupun kelompok diberbagai bidang usaha (jasa konsultasi , konsultan perdagangan , dan usaha mandiri lainnya)
3. Sebagai manajer , asisten manajer , konsultan tenaga teknis lapangan , tenaga administrasi dan jabatan lainnya dalam Lembaga Ekonomi produktif (LEP) .

(Dirjen BINAPENTA , 1998 ; 5)

Dalam penelitian ini ketiga tujuan akhir pelaksanaan program P3T tidak seluruhnya akan ditelusuri , tetapi hanya difokuskan pada satu kegiatan yaitu sebagai

wirausahawan yang berperan sebagai manajer , asisten manajer , konsultan tenaga teknis lapangan , tenaga administrasi dan jabatan lainnya dalam Lembaga Simpan Pinjam yang berlandaskan syari'ah melalui kegiatan Balai Usaha Mandiri terpadu / Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Indikator keberhasilan program adalah dengan mengukur tingkat motivasi (baik sebelum , selama pelatihan maupun pasca pelatihan) dan penguasaan materi (pengetahuan / keterampilan) serta kemampuan peserta untuk mengaplikasikan hasil pelatihan dilapangan sehingga terbentuk sikap kewirausahaan (entrepreneurship)

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas ada beberapa permasalahan yang ingin dikaji lebih lanjut dalam penelitian berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan P3T (Penanggulangan pengangguran Pekerja terampil) ini yaitu :

- 1) Apakah ada pengaruh antara motivasi peserta pelatihan dengan sikap kewirausahaan dibidang Lembaga Ekonomi Produktif Syari'ah BMT
- 2) Apakah ada pengaruh antara pelatihan P3T dengan sikap kewirausahaan dibidang Lembaga Ekonomi Produktif Syari'ah BMT
- 3) Apakah ada pengaruh antara motivasi dan pelatihan terhadap sikap kewirausahaan dibidang Lembaga Ekonomi Produktif Syari'ah BMT

C. Perumusan masalah

Dari identifikasi tersebut diatas dapat dirumuskan dalam suatu permasalahan yaitu : “ **Bagaimanakah pengaruh motivasi dan pelatihan terhadap sikap kewirausahaan bagi para peserta program P3T di Jawa Tengah.** ”

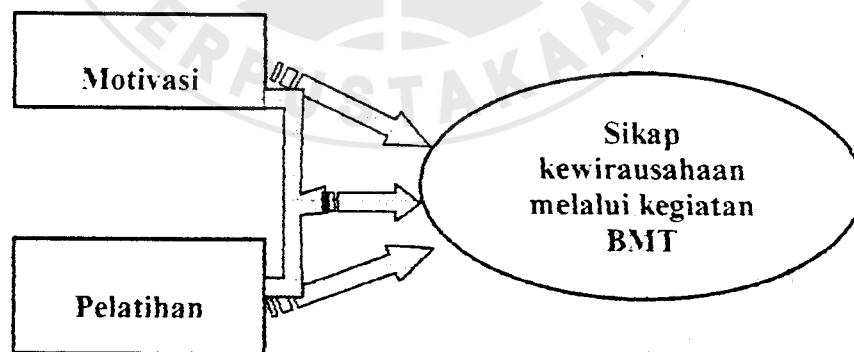
D. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih jauh :

1. Pengaruh motivasi terhadap sikap kewirausahaan dibidang lembaga ekonomi produktif syari'ah BMT
2. Pengaruh pelatihan P3T terhadap sikap kewirausahaan dibidang lembaga ekonomi produktif syari'ah BMT
3. Pengaruh apabila motivasi dan pelatihan secara bersama – sama terhadap sikap kewirausahaan dibidang lembaga ekonomi produktif syari'ah BMT

E. Kerangka pemikiran :

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1
Alur pembentukan sikap kewirausahaan

Dari kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan secara terbalik (flash back) bahwa berkembangnya sikap kewirausahaan dalam lembaga keuangan / lembaga ekonomi produktif (LEP) syari'ah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan tujuan akhir (ultimate goal) karena adanya pengaruh pemberian motivasi (internal maupun eksternal individu) serta adanya pelatihan yaitu pemberian pengetahuan dan keterampilan serta penanaman sikap kewirausahaan kepada peserta pelatihan tersebut.

Disamping itu ada pula dorongan dari luar (outside forces) yang tidak dapat dikendalikan melalui pelatihan seperti pengaruh lingkungan (teman, keluarga, organisasi , serta latar belakang / pengalaman peserta pelatihan itu sendiri) yang kemungkinan berpengaruh terhadap berkembangnya sikap kewirausahaan , tetapi dorongan dari luar tersebut tidak termasuk sebagai obyek dalam penelitian ini.

Dari gambar diatas diduga sebagai variabel yang paling mempengaruhi perubahan sikap kewirausahaan dalam kegiatan lembaga ekonomi produktif syari'ah Baitul maal wat tamwil (BMT). Dengan pertimbangan bahwa motivasi peserta mengikuti pelatihan adalah karena adanya latar belakang berupa hilangnya mata pencaharian / usaha sebagai dampak krisis multi dimensi .

Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelatihan sebagai berikut : “ Sasaran program adalah tersedia dan terciptanya lapangan kerja produktif dan berkelanjutan bagi 65000 orang penganggur tenaga terampil di 18 propinsi (dalam tahun anggaran 1998 / 1999) “ . (Bahan sosialisasi Program Penanggulangan Pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja / usaha produktif).

Disamping itu melalui kegiatan pelatihan tersebut , peserta dituntut secara aktif untuk mampu mempengaruhi / memotivasi lingkungannya (alloplastis) yaitu mampu mendorong dan meyakinkan orang lain agar tertarik, mengikuti dan mendukung kegiatan tersebut sehingga dapat bersama – sama alumni menjadi pemrakarsa berdirinya lembaga keuangan syariah BMT.

Sedangkan melalui kegiatan pelatihan tersebut , para peserta diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan , ketrampilan yang diperoleh melalui kegiatan pelatihan tersebut secara memadai sehingga menjadi orang yang ahli dibidangnya serta mengembangkan sikap positif untuk menjalin kerjasama dengan sesama alumni dan merangsang masyarakat disekitarnya sehingga dapat menciptakan lapangan usaha sendiri tanpa harus menggantungkan diri pada orang lain (wirausahawan) sekaligus dapat memberdayakan ekonomi ummat.

Faktor lingkungan (teman, keluarga , pengalaman masa lalu peserta dsb) meskipun berpengaruh tetapi diduga hanya menjadi penguat dari kedua faktor diatas dan tidak secara tidak langsung berpengaruh terhadap perubahan sikap peserta pelatihan untuk menjadi wirausahawan.

F. Hipotesis

Dari kajian permasalahan diatas , maka penulis dapat mengambil suatu dugaan sementara bahwa :

1. Terdapat hubungan yang bermakna antara pemberaian motivasi dan berkembangnya sikap kewirausahaan bagi peserta pelatihan Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil (P3T) di Jawa Tengah

2. Terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian pelatihan dengan berkembangnya sikap kewirausahaan bagi peserta pelatihan Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil (P3T) di Jawa Tengah
3. Terdapat hubungan yang bermakna antara motivasi bersama pelatihan dengan berkembangnya sikap kewirausahaan bagi peserta pelatihan Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil (P3T) di Jawa Tengah

G. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dalam aspek praktis maupun bagi konsep pengembangan teoritis

1. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian melalui data empirik dapat bermanfaat bagi meningkatkan kemampuan pelatih , pelaksana maupun penyelenggara pelatihan dalam penciptaan wirausahawan – wirausahawan baru baik sendiri maupun berkelompok dalam sektor informal
- b. Memberikan masukan umpan balik (feed back) baik kepada lembaga pelaksana (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) maupun lembaga penyelenggara (dirjen Binapenta) tentang keberhasilan , kelemahan dan alternatif pemecahannya sebagai prediksi atau referensi bagi perencanaan kegiatan sejenis dimasa mendatang.
- c. Memberikan alternatif kegiatan bagi Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah , Pemuda dan olahraga khususnya Direktorat Tenaga Teknis dan Direktorat Dikmas memberikan program alternatif baik suplemen maupun

komplemen program Kelompok Belajar Usaha (KBU) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

2. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan kajian PLS khususnya dalam memperkaya konsep pelatihan ; peningkatan efisiensi dan efektifitas kegiatan pelatihan dengan memadukan dan membuktikan keterkaitan antara teori belajar orang dewasa , sosiologi pendidikan maupun psikologi sosial (dinamika kelompok) .

H. Definisi operasional

1. Pengaruh

Menurut WJS Poerwodarminto (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1994 ; 747) yang dimaksud dengan pengaruh adalah daya yang timbul atau ada dari sesuatu (orang , benda dsb) yang berkuasa atau berkekuatan (gaib) dsb.

Sedang dalam penelitian ini , yang dimaksud pengaruh adalah daya yang timbul karean adanya dorongan (motivasi) baik dari luar (krisis multi dimensi , kehilangan pekerjaan / PHK, serta adanya pemberian pelatihan P3T yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja RI bekerja sama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) mengakibatkan terjadinya perubahan sikap kewirausahaan bagi peserta tersebut di Propinsi Jawa Tengah sehingga mampu memberdayakan masyarakat khususnya ekonomi bawah dan mikro dalam kegiatan lembaga keuangan syariah (lembaga ekonomi produktif) Baitul Maal wat Tamwil .

2. Motivasi .

Definisi motivasi menurut Krech (1963 ; 68) yaitu kekuatan yang mendorong arah atau ketetapan tindakan menuju arah suatu tujuan , tidak timbul dengan sendirinya melainkan ditentukan oleh berbagai faktor seperti situasi, kondisi, kebutuhan , pengalaman dan keinginan yang diarahkan kepada pencapaian suatu tujuan

Sedang yang dimaksud motivasi dalam penelitian ini adalah adanya dorongan atau ketetapan tindakan dari calon peserta pelatihan yang timbul karena adanya suatu kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan kembali , dorongan untuk mengikuti program pelatihan .

Melalui pelatihan tersebut diharapkan dapat terjadi proses internalisasi baik sikap maupun ketrampilan / pengetahuan dari peserta sehingga tumbuh dan berkembang sikap yang “ baru ” yaitu sikap kewirausahaan (entreperneurship) secara berkelompok dalam kegiatan lembaga keuangan produktif berdasarkan sistem syari'ah melalui balai usaha mandiri terpadu atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

3. Pelatihan P3T

Henry Simamora (1997 ; 342) menyatakan bahwa pelatihan adalah “ sebagai proses sistematis karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan – tujuan organisasional sehingga dapat membantu karyawan menunaikan tugas mereka secara lebih baik ”.

Sedangkan yang dimaksud pelatihan dalam penelitian ini adalah suatu Program pelatihan dari Departemen Tenaga Kerja (Dirjen BINAPENTA) bekerjasama dengan Dewan Koperasi Indonesia dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) bertujuan untuk menjangkau kurang lebih 65.000 orang tenaga kerja yang terkena dampak krisis ekonomi sehingga kehilangan pekerjaan atau lahan usaha dengan kualifikasi pendidikan SLTA keatas pada 18 propinsi , dan dukungan alokasi dana ditingkat nasional sebesar Rp. 399.185.163.000,00 sedangkan alokasi dana untuk propinsi Jawa Tengah adalah Rp. 32.549.718.000,00 (Tiga puluh dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah). Dalam pelatihan ini peserta diberikan materi motivasi , keterampilan , pengetahuan dan sikap berkaitan dengan kegiatan lembaga ekonomi produktif syari'ah (LEP BMT) , warung grosir maupun pembina usaha kecil (PUK) , dengan tujuan akhir pelaksanaan program ini adalah untuk menyediakan lapangan kerja bagi penganggur melalui penciptaan kegiatan produktif yang berkelanjutan. yang dimaksud produktif adalah dapat memberikan nilai tambah yaitu penghasilan yang langsung dapat diterima oleh pekerja , sedang berkelanjutan adalah dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan kepada masyarakat atau memberikan pekerjaan yang berkelanjutan kepada tenaga kerja.

4. Sikap

Pengertian sikap menurut Cardno seperti dikutip Mar'at (1982 ; 10) “ Attitude Entails an existing predisposition to respond to social object which , in interaction with situational and other dispositional variables , guides and direct the overt behavior of the individual”

Dengan demikian sikap adalah suatu predisposisi untuk merespon suatu obyek sosial dalam suatu interaksi pada waktu tertentu dan variabel disposisi lainnya yang membimbing dan mengarahkan pada tingkah laku individu yang tampak.

Sikap secara operasional adalah menunjukkan pada konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap kategori stimulus tertentu dan dalam penggunaan praktis sikap sering dihadapkan dengan rangsang sosial dan reaksi yang bersifat emosional .

5. Kewirausahaan

Menurut Robert D Hisrich and Michael J Peters (1992 ; 10) adalah

“**To an economist** , an entrepreneur is one who bring resources , labour , material and other assets into combination that makes their value greater than before , and also one who introduces change , inovation and new order.

To a psychologist : such a person is typically driven by certain forces , need to obtain or attain something to experiment , to accomplish or perhaps to escape authority of others.”

Sedangkan menurut meredith (1985 ; 5) wirausaha adalah “ orang – orang yang mampu mengantisipasi peluang usaha , mengelola sumber daya guna mendapatkan keuntungan dan bertindak dengan tepat menuju sukses “

Untuk menjadi wirausaha tidak dapat lepas dari perilaku yang melatarbelakangi yaitu sikap kewirausahaan.

Sikap kewirausahaan (entrepreneurship) menurut Robert D Hisrich and Michael J Peters (1992 ; 10) is the dynamic process of creating incremental wealth , the wealth is created by individual who assume that major risk in term of equity , time and / or carrier commitments or providing value for some product of services. The production service may or may not be a new unique but value must somehow be infused by receiving and allocating the necessary skill and resources.

Entrepreneurship is the process of creating something different with value by devoting the necessary time and effort , assuming that accompanying financial receiving the result reward of monetary and personal satisfaction.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa definisi sikap kewirausahaan adalah suatu proses yang dinamis dari seseorang yang mempunyai kesiapan mental secara individu untuk memberikan respon baik positif maupun negatif atau netral untuk mengambil resiko baik dengan waktu maupun kesungguhan (commitment) untuk menyiapkan hasil atau jasa tertentu dengan cara yang baru atau memperbaharui cara yang lama melalui penerimaan keterampilan atau sumber – sumber yang dapat meningkatkan penghargaan maupun kenyamanan bagi individu tersebut.

Berkaitan dengan penelitian ini maka pengertian sikap kewirausahaan adalah : kesiapan mental seseorang dalam memberikan respon positif ; mengambil resiko baik dengan waktu maupun kesungguhan (commitment) ; secara berkelompok menyiapkan hasil atau jasa tertentu melalui Lembaga Ekonomi Produktif Syariah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) ; dengan menggunakan cara yang baru yaitu dengan berdasarkan sistem syariah (pola bagi hasil) ; mengantisipasi peluang usaha dengan mengelola sumber daya ; sehingga memperoleh keuntungan dan bertindak dengan tepat menuju sukses ; melalui penerimaan keterampilan atau sumber – sumber yang dapat meningkatkan penghargaan maupun kenyamanan bagi individu dan kelompok tersebut.

Pengertian BMT dikemukakan oleh Amin Aziz adalah “ Lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro dalam bentuk kegiatan menerima tabungan dan memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil dan kecil bawah tersebut “

(Mitra Usaha Kecil ; 1998 ; 14)



Kegiatan lembaga ini bersifat mendukung karena BMT berfungsi sebagai intermediary (perantara) antara penghimpunan dana (tabungan) dengan penanaman dana.

Yang membedakan kegiatan BMT dengan lembaga perbankan yang konvensional adalah bahwa :

1. Lembaga BMT sebagai baitul maal (lembaga sosial / non profit oriented) yang berfungsi menerima (dari aghniya') Zakat, infaq dan shadaqah dan menyalurkan kepada yang berhak menerima (8 asnaf / golongan)
2. Lembaga BMT berfungsi sebagai baitut tamwil / lembaga yang berorientasi untuk mencari keuntungan (profit oriented) yaitu menjadi mediator pemilik dana yang menyimpan uangnya di BMT, dengan tidak mendapatkan bunga (non interest basis) tetapi mendapatkan keuntungan bagi hasil dari debitur (pemakai dana BMT) yang menggunakan dana tersebut untuk kegiatan produktif bagi pengusaha kecil dan kecil bawah (mikro)

Landasan pelaksanaan kegiatan simpan pinjam dengan sistem syariah tersebut adalah Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 278 – 279

Audzubillahiminasysyaithanirajim

“ Yaa ayyuhalladziinaa amamuu itaqullaha wa dzaruu maa baqiyaa minal riba' inkuntum ta'lamuun, fain lam taf'aluu fa'dzamu biharbim minallahi warasuulihii, wa in tubtum falakum ru'usu amwaalikum laa tadhlimuuna wa laa tudzlamuun “

yang artinya kurang lebih : “ Wahai orang – orang yang beriman bertaqwalah kamu sekalian kepada allah dan tinggalkan sisa –sisa riba' itu ,

jika kamu benar – benar beriman , maka jika mereka tidak mau berhenti (daripada riba itu) maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangi mereka .

Dengan kata lain lembaga ekonomi produktif syari'ah Baitul Maal wat Tamwil terdiri dari Baitul maal dan Baitul tamwil yang disingkat menjadi BMT.



